Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Paparan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI PROGRAM BANGGA KENCANA TA 2021

Jakarta, 28 Januari 2021

Yang Saya Hormati,

- ***Bapak Ir. Joko Widodo; Presiden Republik Indonesia;***
- ***Bapak Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU., Menteri Kesehatan Republik Indonesia;***
- ***Bapak Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian M.A, Ph.D, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;***
- ***Bapak Dr (HC) dr. Hasto Wardoyo, SPOG, Kepala BKKBN;***
- ***Bapak dan Ibu narasumber;***
- ***Bapak dan Ibu Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atau yang mewakili;***
- ***Bapak dan Ibu Perwakilan dari Mitra Pembangunan, Pakar, Akademisi, Lembaga Masyarakat, dan Media; serta***
- ***Seluruh peserta yang hadir dalam acara hari ini.***

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua,

1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kita dapat bersama-sama hadir pada acara ini.
2. Pada kesempatan ini, Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan

mendukung acara, **"Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2021."**

Bapak/Ibu hadirin yang Saya Hormati,

(slide 2)

3. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 11 bulan telah memberikan dampak yang luar biasa tidak hanya pada sisi kesehatan namun juga sosial dan ekonomi. Tantangan yang dihadapi dalam konteks kesiapsiagaan dan penanganan Covid-19 menimbulkan risiko gangguan pada pelayanan kesehatan, serta memberikan dampak kepada perekonomian baik dari sisi *supply* maupun *demand*.

(slide 3)

4. Tantangan yang dihadapi selama pandemi tidak hanya terkait pada isu kesehatan tetapi juga pada isu-isu lainnya, diantaranya isu Pembangunan Kependudukan. Angka Fertilitas Total (TFR) antar provinsi masih bervariasi, tidak semua provinsi mendapatkan momentum perubahan struktur penduduk yang sama. Pada tahun 2019 TFR nasional sebesar 2,45 dan diperkirakan akan meningkat pasca pandemi Covid-19. Selain itu, dengan semangat satu data, maka tantangan lain adalah meningkatkan sinergitas dan pemanfaatan data kependudukan dengan data keluarga untuk optimalisasi Bonus Demografi.

   Pada tahun 2020 telah banyak dilakukan kajian pembelajaran yang dilakukan terkait dampak pandemi Covid-19 pada Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi. Salah satunya, dilakukan oleh FKM UI, bekerjasama dengan Bappenas dan UNFPA. Studi tersebut menjunjukkan bahwa Covid-19 berdampak pada menurunnya jumlah akses kunjungan dan layanan kesehatan reproduksi di semua fasilitas kesehatan selama bulan Maret-Mei 2020. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Aliansi Satu Visi pada Agustus-Oktober 2020 terdapat peningkatan perilaku seksual remaja pada masa pandemi, yaitu terdapat sejumlah 6,74 persen remaja 18-24 tahun yang belum menikah

telah melakukan hubungan seksual di masa pandemi, 45 persen remaja pernah menonton tayangan pornografi dan 35 persen diantaranya mengalami adiksi pornografi.

Bapak/Ibu hadirin yang Saya Hormati,

(slide 4)

5. Tahun 2021 adalah tahun dimana kita masih akan hidup berdampingan dengan Covid-19. Namun demikian, tahun 2021 diharapkan akan menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Untuk itu, tema yang diangkat dalam RKP 2021 adalah **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial."** RKP 2021 memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang sejalan dengan Prioritas Nasional pada RPJMN 2020-2024.

(Slide 5)

6. Dalam RKP 2021, isu Pembangunan Keluarga, Kependudukan, KB dan Kesehatan Reproduksi merupakan isu lintas sektor yang mendukung capaian di berbagai program prioritas, terutama PN 3 Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta mendukung beberapa Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) pada Prioritas Nasional (PN) yang akan dilaksanakan.

   Dalam pelaksanaan RKP 2021, diharapkan BKKBN bisa lebih berkontribusi aktif pada beberapa *highlight* kegiatan yang akan dilakukan di 2021 diantaranya, (1) Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2021 dan sistem pendataan terintegrasi menuju Registrasi Sosial 2024; (2) Penguatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; (3) Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan; (4) Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi; (5) Percepatan penurunan stunting, diantaranya melalui penyusunan RAN program Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pemutakhiran data keluarga rentan *stunting* melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA); (6) Penguatan kapasitas keluarga dalam memberikan

pengasuhan dan pendampingan kepada anak dan remaja; (7) Penguatan perlindungan kepada lansia, dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang berperspektif gender.

Hadirin yang Saya muliakan,

(Slide 6)

7. Pada tahun 2021, BKKBN memperoleh alokasi anggaran yang lebih tinggi dibanding angka tahun 2020 pasca *refocusing.* Dengan pagu alokasi yang tersedia diharapkan dapat diprioritaskan pemanfaatannya untuk memenuhi target prioritas nasional yang harus dicapai serta diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan di bidang Bangga Kencana pasca pandemi Covid-19. Selain itu, pelaksanaan *redesign* sistem perencanaan dan penganggaran diharapkan pelaksanaan program berorientasi pada hasil serta antisipatif terhadap berbagai tekanan, untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya.

(Slide 7)

8. Selain melalui Belanja K/L, Program Bangga Kencana juga mendapat dukungan anggaran melalui Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik baik DAK Fisik Reguler maupun DAK Fisik Penugasan (Stunting) serta DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana-BOKB). Melalui anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di daerah dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan *stunting* melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK.

Bapak/Ibu hadirin yang Saya Hormati,

(Slide 8 dan 9)

9. Alokasi anggaran pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk melanjutkan percepatan penanganan dampak Covid-19, untuk itu,

Pemerintah pusat telah melakukan efisiensi belanja dengan mengoptimalisasi anggaran yang tersedia, dengan (1) *Pertama,* Peningkatan Kualitas Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat, yaitu difokuskan untuk mendukung capaian prioritas nasional dan *Major Project; (2)* Optimalisasi Efektivitas dan Pemanfaatan Dana Transfer Khusus (DTK); *(3)* Pemanfaatan Sumber Pendanaan Non Pemerintah; serta (4) Optimalisasi Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Bapak/Ibu hadirin sekalian peserta Rakernas Tahun 2021,

(Slide 10)

a. Pemulihan yang cepat sangat diperlukan untuk mengejar *gap* pencapaian sasaran program Bangga Kencana dalam RKP 2021. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: (1) **Sinkronisasi, integrasi, dan konvergensi antara perencanaan dan penganggaran lintas K/L, lintas instansi, antartingkatan pemerintah; (2) Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan *Major Project*; (3) Dukungan Pemerintah Daerah untuk percepatan penurunan *stunting; (4)* Perluasan inovasi model pembangunan daerah yang adaptif; (5) Penguatan komitmen daerah dalam mendukung integrasi KB dan Kesehatan Reproduksi ke dalam Reformasi Sistem Kesehatan; dan (6) Optimalisasi pelaksanaan Pendataan Keluarga di daerah untuk mendukung pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan perluasan cakupan program perlindungan sosial.**

Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, Kamis, 28 Januari 2021

Subandi Sardjoko
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
Kementerian Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas